

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD : Dinas Perkebunan
TAHUN ANGGARAN : 2026

PROGRAM	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN								
KODE PROGRAM	3.27.06								
KEGIATAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
SUB KEGIATAN	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian								
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). a. Dalam pembangunan sektor perkebunan, laki-laki dan perempuan memiliki peran penting dalam pengelolaan usaha perkebunan, baik sebagai pekebun, pengelola usaha, maupun anggota kelompok tani. Namun demikian, keterlibatan perempuan dalam kegiatan pembinaan, pengawasan usaha perkebunan, serta forum pengambilan keputusan seperti rapat monitoring dan evaluasi, forum kemitraan, maupun rapat penetapan harga TBS masih relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki. Peserta kegiatan pembinaan dan rapat koordinasi terkait pembinaan usaha perkebunan maupun TBS tahun 2025 81,01% laki laki dan 18,99% perempuan. Selain itu, dalam upaya meningkatkan tata kelola usaha perkebunan yang berkelanjutan, pemerintah juga mendorong penerapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil bagi pekebun. Penerapan standar ini bertujuan untuk meningkatkan praktik budidaya yang baik, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas kelapa sawit. Tahun 2026 telah dilaksanakan FGD penyelenggaraan ISPO Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan bagian dari pembinaan dan pendampingan ISPO. Dengan Jumlah peserta 84% laki laki dan 16% perempuan. Namun demikian, masih banyak pekebun yang menghadapi kendala dalam memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO, baik terkait aspek administrasi, kelembagaan pekebun, maupun penerapan praktik perkebunan berkelanjutan. Kondisi ini memerlukan upaya pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan agar pekebun dapat meningkatkan kapasitas dan kesiapan dalam menerapkan prinsip dan kriteria ISPO. Dalam konteks gender, perempuan yang terlibat dalam usaha perkebunan juga memiliki peran dalam kegiatan budidaya, pengelolaan hasil, serta pengelolaan usaha keluarga. Namun akses perempuan terhadap informasi terkait standar keberlanjutan, pembinaan teknis, serta forum pengambilan keputusan dalam usaha perkebunan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan standar usaha perkebunan, termasuk pendampingan ISPO bagi pekebun, perlu dilaksanakan secara inklusif dengan memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh informasi, meningkatkan kapasitas, serta berpartisipasi dalam pengembangan usaha perkebunan yang berkelanjutan. Jumlah perusahaan perkebunan swasta di Kalimantan Timur sejumlah 279 yang mendapatkan sertifikat ISPO 142 pelaku usaha. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, partisipasi, serta kapasitas pekebun laki-laki dan perempuan dalam penerapan standar usaha perkebunan dan sertifikasi ISPO, sehingga mendukung pengelolaan usaha perkebunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekebun. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan : 1) Masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal: Akses terhadap informasi terkait regulasi usaha perkebunan, kemitraan, penetapan harga TBS, dan standar keberlanjutan. Partisipasi perempuan dalam forum pembinaan, rapat monitoring dan evaluasi, serta kegiatan pendampingan usaha perkebunan. Kontrol dalam pengambilan keputusan pada kelembagaan kelompok tani maupun forum resmi usaha perkebunan. Manfaat dari kegiatan pembinaan dan pengawasan yang belum sepenuhnya dirasakan secara merata. b. Penyebab Internal : 1) 1. Peran domestik perempuan yang membatasi waktu untuk mengikuti kegiatan pembinaan atau rapat. 2. Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan kelompok tani masih rendah. 3. Tingkat pemahaman terhadap regulasi usaha perkebunan dan standar keberlanjutan masih terbatas. c. Penyebab Eksternal : 1) 1. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang belum sepenuhnya mendorong keterlibatan perempuan. 2. Forum resmi seperti rapat penetapan harga TBS masih didominasi oleh laki-laki. 3. Akses informasi dan jaringan usaha yang lebih banyak dijangkau oleh laki-laki.								
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan pekebun melalui penerapan prinsip pembangunan perkebunan yang berkelanjutan a. Meningkatnya jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit, terutama kebun sawit rakyat yang memperoleh sertifikat pengelolaan kebun sawit berkelanjutan seperti ISPO/ RSPO. Peningkatan ini berarti semakin banyak perusahaan kebun kelapa sawit yang menerapkan prinsip pembangunan perkebunan yang berkelanjutan dalam kegiatannya 2. Indikator dan Target Kinerja a. Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan) Target 1 Laporan								
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 349.341.732								
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Usaha Perkebunan 2. Fasilitasi Pembinaan dan Peningkatan Kemitraan 3. Rapat Penetapan Harga TBS 4. Pembinaan dan Pendampingan ISPO Pekebun <table><tr><td>Masukan</td><td>Rp. 349,341,732</td></tr><tr><td>Keluaran</td><td>1. Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi yang melibatkan peserta laki-laki dan perempuan 2. Terlaksananya pembinaan kemitraan antara perusahaan dan pekebun 3. Terlaksananya rapat penetapan harga TBS dengan partisipasi perwakilan pekebun 4. Terlaksananya pembinaan penerapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil bagi pekebun</td></tr><tr><td>Hasil</td><td>1. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam forum evaluasi pembangunan usaha perkebunanTerwujudnya hubungan kemitraan yang lebih harmonis antara perusahaan perkebunan dan pekebun. 2. Terwujudnya kemitraan usaha yang lebih inklusif 3. Meningkatnya transparansi dan pemahaman mekanisme harga TBS 4. Meninokatnya kapasitas pekebun laki-laki dan perempuan dalam penerapan standar perkebunan berkelanjutan</td></tr></table>		Masukan	Rp. 349,341,732	Keluaran	1. Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi yang melibatkan peserta laki-laki dan perempuan 2. Terlaksananya pembinaan kemitraan antara perusahaan dan pekebun 3. Terlaksananya rapat penetapan harga TBS dengan partisipasi perwakilan pekebun 4. Terlaksananya pembinaan penerapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil bagi pekebun	Hasil	1. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam forum evaluasi pembangunan usaha perkebunanTerwujudnya hubungan kemitraan yang lebih harmonis antara perusahaan perkebunan dan pekebun. 2. Terwujudnya kemitraan usaha yang lebih inklusif 3. Meningkatnya transparansi dan pemahaman mekanisme harga TBS 4. Meninokatnya kapasitas pekebun laki-laki dan perempuan dalam penerapan standar perkebunan berkelanjutan
Masukan	Rp. 349,341,732								
Keluaran	1. Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi yang melibatkan peserta laki-laki dan perempuan 2. Terlaksananya pembinaan kemitraan antara perusahaan dan pekebun 3. Terlaksananya rapat penetapan harga TBS dengan partisipasi perwakilan pekebun 4. Terlaksananya pembinaan penerapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil bagi pekebun								
Hasil	1. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam forum evaluasi pembangunan usaha perkebunanTerwujudnya hubungan kemitraan yang lebih harmonis antara perusahaan perkebunan dan pekebun. 2. Terwujudnya kemitraan usaha yang lebih inklusif 3. Meningkatnya transparansi dan pemahaman mekanisme harga TBS 4. Meninokatnya kapasitas pekebun laki-laki dan perempuan dalam penerapan standar perkebunan berkelanjutan								

Samarinda, 30 Maret 2026

Plt. Kepala Dinas


Ahmad Muzakki, S.T., M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 197510012001121003